

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi III)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Azhari, Aidul Fitriadi, 2016, Harmonisasi Kewenangan Komisi Yudisial: Dinamika Tafsir dan Perubahan Aturan dalam, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta.
- Saifuddin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- B.S, Regen, 2006, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung.
- Boynton, GR dan Chong Lim Kim, 2010, dalam bukunya Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ekatjahjana, Widodo, _____, *Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Fuad, Zulfikar, 2015, *Lorong Gelap Keadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamidi, Jazim, dkk, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Hariwijaya M. dan Bisri M. Djaelani, 2008, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, Yogyakarta: Hanggar Kreator.

- Manan, H. Abdul, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazir, Moh., 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Rishan, Idul, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta.
- Sagala, Budiman B, 1982, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Gahlia Indonesia, Jakara.
- Saptomo, Ade, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Hukum*, Unesa University Press, Surabaya,
- Saragih, Bintang Regen, 2006, *Politik Hukum*, CV. Sutomo, Bandung.
- Sirajuddin dan Zulkarnaen, ____ *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono, Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta
- Sugono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Suhrawardi, 1993, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Utrecht, E, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta.

Wiranata, I Gede A.B., 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Yulianto Achmad, Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta

Zainal Asikin, Amiruddin, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

TESIS

Aziz Hakim, Muhammad, 2012, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era Reformasi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sahuburua, Aditya, 2016, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Kampus Jakarta Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wahab, Abdul, 2012, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Studi Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

INTERNET

Agus Riwanto, 2016, “Strategi Politik Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR RI dalam Produktivitas Legislasi Nasional”, hlm. 267-286, <https://media.neliti.com/media/publications/77067-ID-strategi-politik-hukum-meningkatkan-kual.pdf>, diakses pada tanggal 3 November 2017

Badan Pengawasan Mahkamah Agung, “Visi dan Misi”, <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/visi-a-misi>, diakses 3 April 2018.

Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online/Daring”, <http://kbbi.web.id/tegak>, diakses 23 Januari 2018.

Komisi Yudisial, “Sejarah Pembentukan”, <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-14-sejarah-pembentukan.html>, diakses 28 Mei 2017.

Yusron Fahmi, “KY: Banyak Rekomendasi Sanksi Hakim nakal Ditolak MA”, <http://news.liputan6.com/read/2681271/ky-banyak-rekomendasi-sanksi-hakim-nakal-ditolak-ma>, diakses 30 Mei 2017.

Mahkamah Agung-Komisi Yudisial, “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI”, http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/kode_etik_hakim.pdf, diakses 27 November 2017.

Mahkamah Agung, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 27 Januari 2018.

Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan”, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/4746/4269>, diakses 27 Januari 2018.

Januardi Husin, “MA Hanya Beri Sanksi pada Tujuh Hakim dari 58 yang Diusulkan”, <https://law-justice.co/ma-hanya-beri-sanksi-pada-tujuh-hakim-dari-58-yang-diusulkan-.html>, diakses 18 Februari 2018.

Rifqi S. Assegaf, “Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial”,
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol14143/mahkamah-agung-vs-komisi-yudisial>, diakses 26 April 2018.

Riri Nazriyah, “Sengketa Lembaga Negara Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung”,
<https://media.neliti.com/media/publications/84871-ID-sengketa-lembaga-negara-antara-komisi-yu.pdf>, diakses 2 Mei 2018.

Noer dan Jaya, “KY Perkenalkan Proses Penanganan Laporan Masyarakat”,
http://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/85/ky-perkenalkan-proses-penanganan-laporan-masyarakat, diakses 2 Mei 2018.

Wajdi, Farid, “KY Usulkan 58 Hakim Dijatuhi Sanksi”,
http://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/41/press-release-ky-usulkan-hakim-dijatuhi-sanksi, diakses 21 Juli 2018.